

Judul : Opsi bayar dam di Indonesia: kewajiban ibadah jadi motor ekonomi
Tanggal : Rabu, 26 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Opsi Bayar Dam Di Indonesia

Kewajiban Ibadah Jadi Motor Ekonomi

ANGGOTA Komisi VIII DPR Derta Rohidin mendukung wacana Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengelola dam (denda/diyat) Haji 2026 dengan opsi penyembelihan di Indonesia. Hal ini merupakan langkah rasional dan progresif yang harus didukung semua pihak.

"Ini bukan sekadar persoalan logistik ibadah, tapi perwujudan kemandirian umat dan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di sektor peternakan," ujar Derta dalam keterangannya, Selasa (24/11/2025). Diketahui, dam haji adalah denda yang harus dibayar oleh jemaah haji karena melanggar aturan atau meninggalkan kewajiban saat menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan data kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221 ribu jemaah, mayoritas mereka akan melaksanakan haji tamattu. Artinya, mendahulukan ibadah

umrah lalu dilanjutkan dengan ibadah haji pada tahun yang sama.

Sehingga, para jemaah haji wajib membayar dam dengan cara menyembelih seekor kambing atau puasa 10 hari bagi yang tidak mampu. Pada tahun 2024, ada sekitar 214.567 ekor kambing yang digunakan untuk pembayaran dam oleh jemaah haji Indonesia.

Derta melanjutkan, potensi jumlah hewan dam yang begitu besar ini merupakan kekuatan ekonomi yang signifikan. Jika skema penyembelihan dialihkan ke Indonesia, daging dam akan didistribusikan langsung kepada mustahik atau orang yang berhak di seluruh Indonesia melalui jejaring Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Kolaborasi dengan Baznas, kata dia, memastikan penyaluran daging dam berlangsung sesuai kaidah syariah, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh wilayah

Indonesia, khususnya 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). "Ini mengonversi kewajiban ibadah menjadi program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan," jelas anggota Fraksi Golkar ini.

Untuk memastikan wacana tata kelola dam ini bisa berjalan efektif dan berkelanjutan, Derta mengusulkan perlu adanya regulasi khusus yang jelas mengenai mekanisme pembayaran dam di tanah air. Juga mendorong agar sistem pembayaran dam jemaah haji bisa dilakukan secara terpusat, baik melalui Baznas ataupun lembaga keuangan syariah yang ditunjuk.

Selain itu, ia mendorong perlunya ada Klaster Peternakan Dam Haji (KPDH) dengan melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) di berbagai sentra peternakan yang ada di wilayah Jawa, Sumatera dan Banten. Namun, KPDH itu harus memiliki standar kualitas ternak yang ketat

dan mekanisme pengadaan yang transparan. "Sehingga, peternak dapat mempersiapkan stok sejak jauh hari sebelum musim haji" kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu ini.

Agar rencana tata Kelola penyembelihan dam haji sukses, Derta mengusulkan optimalisasi teknologi dan peningkatan kapasitas Rumah Potong Hewan (RPH). Optimalisasi teknologi juga dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengemasan daging untuk menjamin daya tahan dan mempermudah distribusi ke seluruh wilayah.

Tapi dia mengingatkan, peningkatan kapasitas RPH perlu keterlibatan pihak swasta dan Pemerintah. Seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk jaminan kehalalan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pengawasan standar kesehatan di daerah.

Derta menegaskan, kebijakan

ini adalah manifestasi dari keberpihakan Pemerintah kepada rakyat. Dengan sinergi yang kuat antara Kemenhaj, Baznas, Kementan, dan Komisi VIII DPR dapat diwujudkan tata kelola dam haji yang syar'i atau sesuai syariat Islam, sejahtera, dan mandiri untuk tahun 2026 dan seterusnya. "Mari kita jadikan dam haji sebagai motor penggerak ekonomi mustahik dan peternak Indonesia," ajak Derta.

Sementara, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Muhammad Yusuf Irfan berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera membahas fatwa dam haji di tanah air. Sebab dam menjadi salah satu isu krusial yang sering ditanyakan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia. "Kita sampai hari ini masih menunggu fatwa dari MUI tentang boleh atau tidaknya dam disembelih di Indonesia," kata Gus Irfan di Jakarta, Jumat (21/11/2025). ■ TIF